

**LAPORAN PENELITIAN DIPA FISIP
UNIVERSITAS LAMPUNG**



***INNOVATIVE GOVERNMENT* PEMERINTAH DAERAH OTONOM BARU :
SINERGITAS *STAKEHOLDER* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA (GADIS) KABUPATEN PESAWARAN**

Tim Peneliti

**Dra. DIAN KAGUNGAN, M.H
NIDN 0015086903/ ID SINTA 6041120
DR. BAMBANG UTOYO SUTİYOSO, M.Si
NIDN 0006026303 / ID SINTA 616310
DODI FAEDLULLOH, S.AN. M.Si
NIDN 0312078805031 /ID SINTA 5978035**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian: **INNOVATIVE GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH OTONOM BARU : SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GADIS KABUPATEN PESAWARAN**

Manfaat sosial ekonomi : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Jenis penelitian : Penelitian dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dra. Dian Kagungan, M.H.
b. NIDN/ID SINTA : 0015086903/6041120
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Jurusan : Administrasi Negara
e. Nomor HP : 081540918098
f. Alamat surel (e-mail) : dian.kagungan@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

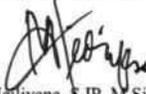
a. Nama Lengkap : Dr. Bambang Utoyo, M.Si
b. NIDN/SINTA ID : 0006026303/616310
c. Jurusan : Administrasi Negara

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dodi Faedulloh, M.Si
b. NIDN/ID SINTA : 0312078805031/5978035
c. Jurusan : Administrasi Negara

Lokasi kegiatan : Kabupaten Pesawaran
Luaran : Jurnal Nasional (Sinta 2)
Lama Kegiatan : 6 (enam) Bulan
Biaya Penelitian : Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
Sumber dana : DIPA FISIP Tahun Anggaran 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Negara


Meliyana, S.IP, M.Si
NIP. 197405202001122002

Bandar Lampung, 26 Juli 2021
Ketua Peneliti,


Dra. Dian Kagungan, M.H
NIP. 196908151997032001

Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama,



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : ***INNOVATIVE GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH OTONOM BARU : SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GADIS KABUPATEN PESAWARAN***

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Jurusan	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dian Kagungan, Dra. MH	Ketua	Kebijakan publik	Administrasi Negara	20
2	Dr.Bambang Utoyo	Anggota (1)	Kebijakan publik	Administrasi Negara	15
3	Dodi Faedlullah, M.Si	Anggota (2)	Kebijakan publik	Administrasi Negara	15

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Sinergitas *stakeholder* dalam pelaksanaan program Gadis di Kabupaten Pesawaran yang diharapkan dapat menjadi *pilot project* model *innovative governement* DOB di Propinsi Lampung dengan melibatkan peran Pemerintah daerah, swasta, masyarakat lokal dan *stakeholder* yang saling bersinergi

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan April tahun . 2021

Berakhir : bulan Agustus tahun 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 12.500.000,00

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) : Kabupaten Pesawaran

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya) : tidak ada

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek) : Memberikan kontribusi mendasar bagi pengembangan ilmu kebijakan publik terutama yang menyangkut sinergitas antar stakeholder dalam pelaksanaan *innovative governement* DOB dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan DOB yang diharapkan semakin meningkat

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi): jurnal Sosiohumaniora (sinta 2) dan atau jurnal Borneo (sinta 2)

RINGKASAN

Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) merupakan satu-satunya inovasi kebijakan yang berupa bantuan keuangan yang ada di Provinsi Lampung yang ditujukan untuk memperkuat sekaligus memberi ruang gerak inisiatif BUMDes, sebab biasanya program-program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Lampung hanya berfokus pada bantuan peningkatan infrastruktur saja sehingga inovasi kebijakan ini seharusnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan nilai kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa di Kabupaten Pesawaran.

Paradigma *good governance* mengedepankan *sinergitas* antara *state*, *private* dan *society* serta *stakeholders*. Adanya *sinergitas multistakeholders* diharapkan mampu mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang keterlibatan *stakeholders* berkaitan dengan pelaksanaan program inovatif dari pemerintah daerah sangat minim. Permasalahan yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) yaitu belum adanya administrasi & standard operating prosedur (SOP) per unit usaha dan manajemen usaha yang buruk masih mewarnai kinerja beberapa badan usaha milik desa (BUMDes) di desa-desa di Kabupaten Pesawaran. Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan inovasi memerlukan *sinergitas stakeholders* yaitu antara pemerintah (negara), masyarakat, dan swasta. Namun pada kenyataannya dari beberapa penelitian yang kami lakukan, peran pihak swasta (*private*) masih minim keterlibatannya..

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah *sinergitas stakeholders* dalam pelaksanaan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran?

Tujuan penelitian ini Mendeskripsikan dan menganalisis *sinergitas stakeholder* dalam pelaksanaan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, Memberikan rekomendasi kebijakan terkait pentingnya *sinergitas stakeholder* dalam pelaksanaan program GaDIS di Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan *FGD terhadap key informan*. Lokasi penelitian Kabupaten Pesawaran Penelitian ini memfokuskan : *sinergitas stakeholder* dalam pelaksanaan program GaDIS di Kabupaten Pesawaran

Aktifitas penelitian ini meliputi kajian mengenai *sinergitas antar stakeholder* dalam pelaksanaan program Gadis di Kabupaten Pesawaran. Luaran dari penelitian ini adalah: Jurnal Terakreditasi Nasional Sinta 2 (submit). Hasil

penelitian ini adalah : indikator komunikasi dalam pelaksanaan program Gadis berjalan cukup baik yang dapat dilihat dari hubungan antar aktor pentahelix yang berjalan sesuai dengan tujuan. Para aktor pentahelix melakukan komunikasi antar pihak yang turut terlibat dalam pelaksanaan program Gadis secara virtual maupun tatap muka. Koordinasi dalam pelaksanaan program Gadis belum berjalan secara optimal, sebab seluruh aktor pentahelix yang terlibat dalam pelaksanaan program Gadis cenderung berjalan dengan hanya melibatkan beberapa aktor saja, beberapa aktor pentahelix yang turut terlibat cenderung berjalan masing-masing.

Key words: sinergitas, stakeholder, program Gadis, Kabupaten Pesawaran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekat pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam kerangka hukum yang berlaku oleh karena itu daerah dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah pusat mengadakan ”*Innovative Government Awards (IGA)*” sebagai *support eksternal* agar pemerintah daerah selalu berinovasi untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya dan menambah daya saing bagi daerah tersebut. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu daerah otonom baru di Propinsi Lampung mempunyai inovasi dalam pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran nomor 49 tahun 2017 yang dinamakan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS). GaDIS merupakan program pemberian bantuan keuangan untuk mewujudkan desa tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi ekonomi kreatif dan inovasi desa demi kemajuan desa dan terciptanya lapangan kerja melalui peningkatan badan usaha milik desa (BUMDes), bagi desa yang mampu mengelola BUMDes-nya dengan baik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan memberikan penghargaan “*BUMDes Award*”. Hal ini sebagai upaya memberikan penghargaan bagi desa yang secara kepatutan telah menjadi desa yang baik dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan yang akan direalisasikan berupa bantuan stimulus keuangan ke BUMDes.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh desa untuk mendapatkan program GaDIS, diantaranya : tertib administrasi desa, lunas PBB, berjalannya Siskamling, inovasi PKK, dan yang paling utama ialah adanya dokumen perencanaan usaha BUMDes. Sebagai program yang ditekankan untuk penguatan BUMDes, bantuan dana

GaDIS yang berjumlah Rp100 juta untuk setiap Desa tersebut merupakan komponen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bagi desa yang telah memperoleh bantuan keuangan GaDIS tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut dari program ini

Adapun desa-desa yang telah mendapatkan bantuan dana dari Program GaDIS diantaranya :

Tabel 1.1 Data Desa Penerima Bantuan Keuangan Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa/Ranking	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Way Lima	1. Padang Manis 2. Cimanuk 3. Kuta Dalam 4. Pekon Doh	Rp 100.000.000,-/ desa
2	Punduh Pedada	1. Bawang 2. Bangunrejo 3. Banding Agung 4. Kota Jawa	Rp 100.000.000,-/ desa
3	Way Ratai	1. Mulyosari 2. Gunung Rejo 3. Ceringin Asri 4. Wates Way Ratai	Rp 100.000.000,-/ desa
4	Kedondong	1. Kedondong 2. Tempelrejo 3. Pesawaran 4. Kertasana	Rp 100.000.000,-/ desa
5	Gedong Tataan	1. Bogorojo 2. Taman Sari 3. Kebugusan 4. Gedong Tataan	Rp 100.000.000,-/ desa
6	Padang Cermin	1. Banjaran 2. Hanau Berak 3. Gayau 4. Trimulyo	Rp 100.000.000,-/ desa
7	Marga Punduh	1. Sukajaya Punduh 2. Pekon Ampai 3. Umbul Limus 4. Kunyaian	Rp 100.000.000,-/ desa

8	Negeri Katon	1. Sinar Bandung 2. Ponco Kresno 3. Karang Rejo 4. Purwo Rejo	Rp 100.000.000,-/ desa
9	Way Khilau	1. Kubu Batu 2. Penengahan 3. Padang Cermin 4. Sukajaya	Rp 100.000.000,-/ desa
10	Teluk Pandan	1. Hanura 2. Tanjung Agung 3. Hurun 4. Sidodadi	Rp 100.000.000,-/ desa
11	Tegineneng	1. Bumi Agung 2. Margo Mulyo 3. Sinar Jati 4. Negara Ratu Wates	Rp 100.000.000,-/ desa

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran, 2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 ada 11 kecamatan yang terdiri dari 44 desa yang telah berhasil mendapatkan dana bantuan dari program GaDIS. Desa-desa tersebut merupakan desa yang menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat dan lolos administrasi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Masing-masing desa yang ada di 11 kecamatan tersebut mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 100 juta.

Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) merupakan satu-satunya inovasi kebijakan yang berupa bantuan keuangan yang ada di Provinsi Lampung yang ditujukan untuk memperkuat sekaligus memberi ruang gerak inisiatif BUMDes, sebab biasanya program-program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Lampung hanya berfokus pada bantuan peningkatan infrastruktur saja sehingga inovasi kebijakan ini seharusnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan nilai kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa di Kabupaten Pesawaran.

Paradigma *good governance* mengedepankan *sinergitas* antara *state*, *private* dan *society* serta *stakeholders*. Adanya *sinergitas multistakeholders* diharapkan mampu

mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang keterlibatan *stakeholders* berkaitan dengan pelaksanaan program inovatif dari pemerintah daerah sangat minim. Permasalahan yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) yaitu belum adanya administrasi & standard operating prosedur (SOP) per unit usaha dan manajemen usaha yang buruk masih mewarnai kinerja beberapa badan usaha milik desa (BUMDes) di desa-desa di Kabupaten Pesawaran. Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan inovasi memerlukan sinergitas *stakeholders* yaitu antara pemerintah (negara), masyarakat, dan swasta. Namun pada kenyataannya dari beberapa penelitian yang kami lakukan, peran pihak swasta (*private*) masih minim keterlibatannya..

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sinergitas *stakeholders* dalam pelaksanaan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran?

1.2 Tujuan Khusus Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas *stakeholder* dalam pelaksanaan program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung
2. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait pentingnya sinergitas *stakeholder* dalam pelaksanaan program GaDIS di Kabupaten Pesawaran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sinergi

Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu

a. Komunikasi

Sofyandi dan Garniwa (2007), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
2. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18). Silalahi (2011, h.217), “koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”. Moekijat (1994, h.39) menyebutkan ada 3 (tiga) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

1) Hubungan langsung

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi

langsung.

2) Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

2.2 Governance

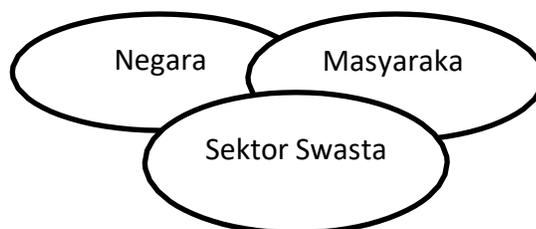
Sumarto (2003, h.2), *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Sedarmayanti (2009, h.280) mengungkapkan, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

a. Negara/pemerintahan:

konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal

c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.



Gambar 2.1: Hubungan Antar Sektor dalam *Governance*
Sumber: Sedarmayanti (2009, h.280)

Hal tersebut mengartikan bahwa dalam *governance* terdapat interaksi dalam ketiga aktor tersebut yang tidak saling mendominasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pemerintah bukanlah aktor satu-satunya dalam suatu tata pemerintahan. Dengan adanya interaksi antar *stakeholders* tersebut berarti adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah

2. Konsep Inovasi

Menurut Rogers (2003, h.12), menjelaskan bahwa, “*an idea, practice, or object perceived as new by the individual*. Selain itu inovasi juga tidak terlepas dari beberapa hal antara lain:

a. Pengetahuan baru

Sebuah inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah *system social* tertentu. Pengetahuan ini merupakan factor penting penentu perubahan social yang terjadi dalam masyarakat.

b. Cara baru

Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.

c. Objek baru

Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik (berwujud/*tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangibile*).

d. Teknologi baru

Inovasi sangat indetik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indicator kemajuan dari sebuah

produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.

e. Penemuan baru

Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan. (Noor (2013, h.87)).

Noor (2013, h.94) mengingatkan inovasi adalah perpaduan dari lima komponen yaitu:

- a. *Strategy and Customers*. Pemerintahan daerah harus tahu kapan, dimana, dan bagaimana inovasi itu dilakukan
- b. *Measures and Performance* yaitu harus diketahui bagaimana mengukur keberhasilan inovasi yang dilakukan
- c. *Process (and Infrastructure)*, apakah inovasi yang dilakukan bersifat sementara atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi.
- d. *People*, bagaimana budaya organisasi yang ada di dalam memahami inovasi tersebut.
- e. *Technology*, bagaimana pemanfaatan alat dalam berinovasi tersebut?

Noor (2013, h.113) mengungkapkan bahwa dalam proses inovasi sebagai sebuah siklus ada empat komponen yang berperan yaitu: *idea generations and discovery, idea selection, idea implementation, and idea diffusion*.

2.4 Tinjauan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS)

Program GaDIS merupakan sebuah inovasi kebijakan pemberian *reward* atau penghargaan kepada desa yang berprestasi. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran nomor 49 tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mengeluarkan kebijakan menyalurkan anggaran melalui Program GaDIS untuk menstimulus desa lain agar bisa mencontoh keberhasilan desa yang menjadi *pilot project*. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh desa untuk mendapatkan program GaDIS, diantaranya :

- 1) Tertib Administrasi Desa
- 2) Lunas PBB
- 3) Berjalannya Sistem keamanan lingkungan (Siskamling)
- 4) Inovasi PKK
- 5) Dokumen Perencanaan Usaha BUMDes.

Sebagai program yang ditekankan untuk penguatan BUMDes, bantuan dana GaDIS yang berjumlah Rp100 juta untuk setiap desa merupakan komponen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun prinsip-prinsip dari bantuan keuangan GaDIS menurut Pasal 6 Perbup Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017, antara lain :

- 1) *Inisiatif*, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat desa itu sendiri.
- 2) *Partisipatif*, bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.
- 3) *Demokratis*, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama oleh masyarakat.
- 4) *Manfaat*, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- 5) *Gotong Royong*, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.

6) *Berkelanjutan*, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Diharapkan dengan adanya program GaDIS, potensi perekonomian masyarakat desa Kabupaten Pesawaran dapat dikembangkan melalui BUMDes. Pergerakan ekonomi desa melalui BUMDes bukan saja memberikan peluang efek positif bagi Pendapatan Asli Desa namun juga efek domino berupa tumbuhnya inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Sehingga pada akhirnya Program ini dapat menjadi salah satu sebab efektif dalam rangka memberikan wahana aktualisasi desa dan masyarakat secara keseluruhan agar dapat memperoleh nilai tambah yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai fakta yang terjadi di lokasi penelitian, di mana tiap data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2005). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu sinergitas antar stakeholder dalam pelaksanaan program GaDIS di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung

3.2 Lokasi Penelitian

Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran

3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan untuk mengarahkan pelaksanaan suatu penelitian atau pengamatan. Topik atau fokus menurut Creswell dalam Tresiana (2013:39) merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Topik/ fokus itu dapat saja muncul dari tinjauan literatur, dianjurkan oleh rekan, peneliti atau dikembangkan melalui pengalaman nyata.

Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu sinergitas antar stakeholder dalam pelaksanaan program GaDIS di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada pendapat Sofyandi dan Garniwa (2007), bahwa sinergitas dapat

diukur ke dalam 2 hal yaitu

a. Komunikasi

pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
2. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwa dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18). Silalahi (2011, h.217), “koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”. Moekijat (1994, h.39) menyebutkan ada 3 (tiga) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

1. Hubungan langsung

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.

2. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

3. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui *key informan* yang berkompeten dengan kajian penelitian ini yaitu : (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten

Pesawaran (2) Aparatur Desa Sidodadi, Badan Usaha Milik (BUMDes) desa Sidodadi (3) Stakeholder.

Data sekunder, diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan substansi penelitian (Undang-Undang, surat-surat keputusan, arsip-arsip, foto/dokumentasi dan lainnya).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada *key informan*, fgd, studi dokumentasi dan observasi lapang/kunjungan lapang.

3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data antara lain reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan yang dalam pemeriksaan data menggunakan 4 (empat) kriteria (Moleong, 2005) yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). Untuk memeriksa kredibilitas (Moleong, 2005) maka peneliti melakukan triangulasi, dan teknik analisis kasus negatif dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan (Moleong, 2005)

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sidodadi

Desa Sidodadi di bentuk pada tahun 1936 yang meliputi daerah dataran rendah yang dikelilingi oleh hamparan laut yang membentang mengelilingi desa/kelurahan tersebut. Berikut adalah beberapa nama Kepala Desa yang memimpin Desa Sidodadi beserta tahun kepemimpinannya :

Tabel 4.1 Urutan Jabatan Kepala Desa Sidodadi

No.	Nama Kepala Desa	Tahun
1	Wongso Dikromo	1936-1956
2	Muhamad Dahlan	1945-1963
3	Manguntoro	1963-1972
4	Azwar Manaf	1972-1981
5	Sudarso	1981-1990
6	Harits Alhamdani	1990-2007
7	Minan	2007-2018

Sumber : Monografi Desa Sidodadi, 2018

Desa Sidodadi memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Sumber daya alam yang terdapat di Desa Sidodadi terdiri dari sawah, ladang, perkebunan dan peternakan. Luas wilayah Desa Sidodadi yaitu 4159 ha yang terdiri dari sawah, ladang dan perkebunan serta peternakan dengan luasan sebagai berikut :

- a) Lahan Sawah : 0 Ha
- b) Lahan Ladang : 177 Ha
- c) Lahan Perkebunan : 175,00 Ha
- d) Lahan Peternakan : 0,50 Ha
- e) Hutan : 350,00 Ha

- f) Waduk/Danau/Situ : - Ha
- g) Lahan Lainnya : 2747,00 Ha.

Desa Sidodadi dihuni oleh suku pribumi dan pendatang yang berjumlah 2098 jiwa dengan penduduk laki laki berjumlah 1064 jiwa dan perempuan berjumlah 1034 jiwa. Desa Sidodadi mempunyai 8 RT yang tersebar di wilayah desa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Nama RT	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
RT 01	Dusun A	128	121	249
RT 02	Dusun A	139	104	243
RT 01	Dusun B	196	185	381
RT 02	Dusun B	109	100	209
RT 01	Dusun C	162	118	280
RT 02	Dusun C	113	109	222
RT 01	Dusun D	102	112	214
RT 02	Dusun D	115	185	300
Jumlah		1064	1034	2098

Sumber : Profil Desa Sidodadi, 2018

Desa Sidodadi memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, daftar penduduk menurut usia pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah
0-15 tahun	495 jiwa
16-31 tahun	637 jiwa
32-47 tahun	484 jiwa
48-63 tahun	387 jiwa
64-79 tahun	85 jiwa

Sumber : Monografi Desa Sidodadi, 2018

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa Sidodadi yaitu 2.908 jiwa, maka masyarakatnya pun memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S2	-
S1	10 orang
D3	4 orang
D1/D2	5 orang

SLTA/SMA	96 orang
SLTP/SMP	320 orang
SD	318 orang
Tidak Tamat SD	318 orang

Sumber : *Monografi Desa Sidodadi, 2018*

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan masyarakat Desa Sidodadi rata-rata lulusan SMP sebanyak 320 orang, kemudian lulusan SD sebanyak 318 orang, lulusan SMA sebanyak 96 orang, lulusan S1 dan D3 sebanyak 14 orang, lulusan D1/D2 sebanyak 5 orang, dan masyarakat yang tidak tamat SD sebanyak 318 orang.

Dilihat dari potensi wilayah Desa Sidodadi terdapat pada hasil bumi yang lakukan oleh penduduk desa. Hasil bumi berupa sawah, ladang dan perkebunan serta peternakan menjadikan Desa Sidodadi dikatakan berkembang. Hasil bumi berupa bahan pangan dan perkebunan coklat serta ternak memicu berkembang nya perekonomian desa dengan adanya swasembada pangan serta koperasi. Ada beberapa mata pencaharian pokok yang menunjang perekonomian masyarakat Desa Sidodadi, diantaranya :

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidodadi

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani	1044
2	Petani	323
3	Peternak	91
4	Pembantu Rumah Tangga	35
5	Karyawan Perusahaan Swasta	15
6	Pedagang Keliling	11
7	Pegawai Negeri Sipil	5
8	Lain-lain	574

Sumber : *Monografi Desa Sidodadi, 2018*

Di lihat pada tabel diatas, mayoritas masyarakat di Desa Sidodadi bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani. Namun tidak sedikit juga masyarakat di Desa Sidodadi yang bekerja sebagai peternak.

Program Gerakan Desa Iktu Sejahtera (GaDIS) dijalankan oleh beberapa tim Koordinasi salah satunya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) merupakan unsur pelaksana

urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Kepala Dinas membawahi :

- a. Sekretaris, membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Bidang Bina Pemerintahan dan Kelembagaan Desa membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Perangkat Desa.
 - 2) Seksi Bina Kelembagaan Desa.
 - 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa.
- c. Bidang Keuangan, Aset dan Pembangunan Desa membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan Keuangan Desa.
 - 2) Seksi Manajemen Aset Desa.
 - 3) Seksi Pembangunan Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 2) Seksi Pembinaan Kemasyarakatan.
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

V. PEMBAHASAN

a. Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) Kabupaten Pesawaran

Program Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) merupakan suatu inovasi berlandaskan semangat *dynamic government* dimana Pemerintah Daerah secara jitu menetapkan *shortcut* pemberdayaan yang aplikatif dan dibutuhkan desa agar mampu berdikari, serta relevan dengan Nawacita Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran (desa). Ketangguhan desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena ketangguhan desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan.

Ketangguhan desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuh kembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya. Upaya untuk mewujudkan desa yang tangguh dimaknai dengan menjamin pemerataan pembangunan di semua bidang untuk peningkatan taraf hidup masyarakat perdesaan dengan cara mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi ekonomi kreatif demi terciptanya lapangan kerja

1. Prinsip-Prinsip Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS)

di Kabupaten Pesawaran

Menurut Pasal 6 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017, ada beberapa prinsip-prinsip bantuan keuangan Program GaDIS yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, antara lain :

1) Inisiatif

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 mengenai tujuan dari adanya Program GaDIS yaitu untuk memberikan wahana aktualisasi desa dan masyarakat secara keseluruhan agar dapat memperoleh nilai tambah yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa sehingga dapat menjadikan desa tangguh dan mandiri, oleh karena itu sudah seharusnya Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan masyarakat untuk membuat beberapa rancangan unit kegiatan usaha yang akan diajukan demi mendapatkan bantuan keuangan Program GaDIS sebesar Rp 100 juta.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip berorientasi kepada kepentingan umum. Agar manfaat dari sebuah program kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah sudah seharusnya berorientasi kepada kepentingan umum. Hal ini telah diterapkan oleh Desa Sidodadi dalam membuat rencana kegiatan usaha untuk mendapatkan bantuan dana dari Program GaDIS.

Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mensosialisasikan rancangan pengajuan kegiatan usaha atas inisiatif masyarakat desa sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki desa. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan Inovasi Program GaDIS khususnya di Desa Sidodadi, terlihat bahwa aspek inisiatif dalam hal pengajuan proposal kegiatan usaha telah benar-benar dilaksanakan oleh kedua desa ini. Proposal rencana kegiatan usaha untuk mendapatkan bantuan dari

program ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat. Namun sayangnya, di kedua desa ini masih terdapat beberapa usaha yang dikelola secara individu (perorangan), padahal seharusnya apabila usaha-usaha tersebut dikelola secara berkelompok, maka akan semakin banyak pula masyarakat yang terbantu perekonomiannya.

2) Partisipatif

Agar kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka diperlukan suatu kondisi yang mendukung implementasi kebijakan. Menurut Nurcholis (2007:272) terdapat beberapa kondisi yang memengaruhi kebijakan, yaitu :

- a) Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal.
- b) Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
- c) Dukungan dari berbagai sumber daya yang ada, makin banyak yang mendukung maka makin tinggi tingkat kesuksesannya.
- d) Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksana kebijakan.
- e) Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Berdasarkan pendapat menurut Nurcholis (2007:272) diatas, semakin banyaknya dukungan dari berbagai sumber daya yang ada seperti halnya partisipasi masyarakat dan para stakeholder terkait, maka dapat meningkatkan tingkat kesuksesan suatu program kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan Inovasi Program GaDIS khususnya di Desa Sidodadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat khususnya masyarakat Desa Sidodadi turut berpartisipasi dalam setiap proses kebijakan Program GaDIS ini seperti proses perencanaan dan pengimplementasinya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan program kebijakan yang dibuat. Partisipasi masyarakat disamping menopang percepatan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain juga akan berdampak pada proses penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan

kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

3) Demokratis

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi di segala aspek dan bidang. Penganutan demokrasi yang dilakukan oleh Negara Indonesia ditujukan agar masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam proses demokrasi yang terjadi di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Demokrasi tidak akan dapat diterapkan dengan baik tanpa dukungan dan partisipasi seluruh warga negara.

Mengimplementasikan suatu kebijakan publik harus mengutamakan asas demokratis dalam ruang lingkup masyarakat agar tujuan dari suatu program kebijakan tersebut dapat tercapai. Sebagai contohnya Program GaDIS yang ditujukan pada pemberdayaan masyarakat desa di Pesawaran, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Sidodadi didapatkan data bahwa desa ini telah mengimplementasikan Program GaDIS dengan menjunjung tinggi asas demokratis dalam seluruh proses kegiatan usaha mulai dari penentuan kegiatan usaha yang akan direncanakan hingga pengimplementasian kegiatan usaha tersebut. Cara yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sidodadi dalam menjunjung tinggi demokratis ialah dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat seperti contohnya melakukan musyawarah dusun untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat dusun dalam membuat proposal kegiatan usaha yang akan diajukan, lalu melakukan sistem perankingan yang dilakukan oleh Pemerintah desa yang berkordinasi dengan Badan Usaha milik Desa (BumDes) untuk memilih dan meranking proposal kegiatan usaha yang selanjutnya akan dimusyawarahkan kembali bersama masyarakat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes).

4) Manfaat

Menurut Albury dalam Rumoharbo (2016:14), inovasi berhubungan erat dengan ide-ide yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus

mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.

Inovasi Program GaDIS di Kabupaten Pesawaran pun pasti memiliki manfaat, karena apabila suatu program kebijakan tidak dapat memberikan nilai manfaat bagi penggunanya yang dalam hal ini adalah masyarakat, maka bisa dikatakan program tersebut gagal dan hanya menghabiskan anggaran secara percuma. Adanya program GaDIS di Desa Sidodadi memberikan manfaat berupa terbukanya lapangan kerja melalui banyaknya usaha-usaha kecil menengah (UKM-UKM) dengan memanfaatkan potensi-potensi berupa sumber daya alam (hasil-hasil alam) dan sumber daya manusia (keterampilan). Selain itu manfaat lain dari adanya Program GaDIS di Desa Sidodadi adalah dapat mengubah persepsi masyarakat untuk bekerja secara bersama-sama membangun desanya sehingga mereka tidak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan karena di desa pun mereka dapat berwirausaha dan meningkatkan perekonomiannya.

5) Gotong Royong

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan orang lain dalam berbagai hal. Seperti halnya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang memang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat maka sudah seharusnya Program GaDIS ini dilakukan secara gotong royong antar masyarakat. Gotong royong dalam mengimplementasikan sebuah program kebijakan memang sudah seharusnya dilakukan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Aspek gotong royong dalam hal ini mencakup pada dukungan dari masyarakat serta *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan Program GaDIS.

Menurut Nurcholis (2007:272) dukungan dari berbagai sumber daya manusia seperti masyarakat dan lembaga eksternal dapat memengaruhi tingkat kesuksesan dari sebuah program yang dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada beberapa informan yang ada di Desa Sidodadi terlihat bahwa seluruh unit kegiatan usaha yang ada di kedua desa tersebut khususnya unit kegiatan usaha yang dijalankan secara berkelompok telah dilaksanakan secara gotong royong.

Penerapan prinsip gotong royong dalam menjalankan unit kegiatan usaha memang sudah seharusnya dilakukan oleh para pelaku kegiatan usaha sehingga unit-unit kegiatan usaha mereka dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

6) Berkelanjutan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan publik pada masyarakat. Tuntutan menjalankan pemerintahan yang bersih ditujukan pada pemerintah daerah, salah satu wujudnya adalah dengan menghasilkan regulasi atau kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan publik dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut (Arenawati, 2014:81). Hadirnya Program GaDIS ini berawal dari adanya permasalahan kemiskinan di desa-desa yang ada di Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran membuat suatu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di desa dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat desa dapat hidup sejahtera.

Program bantuan dana GaDIS sebesar Rp 100 juta yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Pesawaran yang memenuhi persyaratan, ditujukan agar masyarakat membuat dan menjalankan suatu usaha agar bisa memiliki penghasilan yang dapat meningkatkan perekonomian mereka sehingga bisa membuat kehidupan yang lebih sejahtera.

Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat mengelola kegiatan usaha tersebut agar usahanya bisa terus maju dan berkembang sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa unit kegiatan usaha yang vakum dan bahkan sudah tidak berjalan lagi karena mengalami kerugian. Dalam pengimplementasian Program GaDIS di Desa Sidodadi, unit-unit kegiatan usaha yang ada di desa tersebut mayoritas belum dapat memenuhi aspek berkelanjutan.

2. Pelaksanaan prinsip-prinsip program GaDIS sesuai pasal 6 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 dengan menggunakan karakteristik inovasi menurut Rogers (Noor, 2017:92)

Menurut Gopalakrishnan dan Damanpur dalam Noor (2017:84) inovasi pada dasarnya menunjukkan pada sesuatu yang baru, apakah berbentuk gagasan-gagasan baru, produk, metode atau bentuk pelayanan. Menurut Albury dalam Rumoharbo (2016:14) menyatakan secara sederhana bahwa inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.

Menurut Suwarno dalam Noor (2017:87) inovasi tidak akan terlepas dari pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi, dan penemuan baru. Jika ditinjau dari pendapat menurut Suwarno, inovasi program GaDIS merupakan sebuah cara baru yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menjawab masalah kemiskinan yang ada di desa melalui pemberdayaan masyarakat desa. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yaitu program pengentasan kemiskinan melalui pembuatan atau perbaikan infrastruktur yang sebelumnya dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Menurut Rogers, yang dikutip dari Noor (2017:92) mendefinisikan ada beberapa karakteristik intrinsik inovasi, diantaranya :

1. Keunggulan relatif (*relative advantage*)

Inovasi menurut Rogers dalam Rumahorbo (2016 : 14) tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai karena harus bisa membawa hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan Iptek baru, tetapi juga melibatkan cara pandang dan perubahan sosial. Keunggulan berasal dari kata unggul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) keunggulan berarti keadaan (lebih) unggul; keutamaan; kepandaian (kecakapan, kebaikan, kekuatan, dan sebagainya) yang lebih daripada yang lain. Dalam hal ini kata keunggulan menekankan pada dampak positif yang dihasilkan dari sebuah inovasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom Baru (DOB) harus memiliki sifat keunggulan yang nyata dibandingkan dengan inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan yang telah dibuat sebelumnya oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat. Menurut Albury dalam Suwarno (2008:12) secara konseptual terdapat tiga jenis inovasi kebijakan yaitu :

- 1) *Policy innovation : new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan) : setiap kebijakan publik harus memuat sesuatu yang baru.
- 2) *Innovations in the policy-making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan) : inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan
- 3) *Policy to foster innovation and its diffusion* : kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor.

Dilihat dari ketiga jenis inovasi diatas, Inovasi Program GaDIS di Kabupaten Pesawaran merupakan jenis dari suatu inovasi kebijakan karena memiliki inisiatif dan arah kebijakan baru. Inovasi Program GaDIS merupakan suatu inovasi yang dibuat berdasarkan pada kondisi potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan alokasi dana yang berasal dari APBD Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa informan mengenai keunggulan relatif dari Inovasi Program GaDIS, terdapat beberapa hal yang membedakan program ini dengan program-program lainnya *pertama* tidak ada program bantuan dana di Provinsi Lampung selain Program GaDIS yang memberdayakan masyarakat dengan cara pemberian modal usaha sehingga dapat membuka lapangan kerja di desa dan bisa meningkatkan perekonomian desa, karena selama ini program-program kebijakan mayoritas ditujukan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur saja. Faktor pembeda yang *kedua* Program GaDIS ini menekankan eksplorasi potensi lokal untuk dikembangkan sebab unit-unit kegiatan

usaha yang dibuat oleh masyarakat desa benar-benar memanfaatkan potensi lokal mulai dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

Ketiga, program GaDIS memperkuat sekaligus memberi ruang gerak inisiatif Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sebab 30% keuntungan dari hasil unit-unit kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat nantinya akan diberikan kepada BumDes yang kemudian oleh BumDes akan dialihkan kembali untuk membuat usaha lain. **Keempat**, Program GaDIS ini juga dapat membuat Kepala Desa agar memiliki kepercayaan kepada BumDes dalam mengelola setiap usaha karena selama ini Kepala Desa tidak hanya berperan sebagai pengawas/komisaris BumDes melainkan juga ikut mengurus setiap kegiatan usaha yang dikelola BumDes. Faktor **kelima** yaitu dengan adanya Program GaDIS ini dapat memicu dan memacu desa untuk menganggarkan penyertaan modal selain Program GaDIS, hal ini dilakukan agar kas desa akan tetap memiliki anggaran yang dapat dikelola. Faktor **keenam**, dengan adanya Program GaDIS yaitu dapat membuka cakrawala berfikir desa dan BumDes. Apabila koordinasi antara Pemerintah desa dengan Bumdes dapat berjalan dengan baik, maka akan semakin banyak peluang pemberdayaan ekonomi lokal yang bisa dimanfaatkan sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan point-point diatas, sejauh ini bisa dikatakan Inovasi Program GaDIS adalah inovasi kebijakan yang lebih unggul dibandingkan inovasi-inovasi yang dibuat yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan karena inovasi Program GaDIS ini memiliki banyak dampak positif yang dapat diperoleh khususnya pada pengentasan kemiskinan di desa ketika program ini diimplementasikan.

2. Kompatibilitas (*compatibility*)

Menurut Rogers yang dikutip dari Noor (2017:92) menyatakan bahwa inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai (*compatible*).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan aspek kompatibilitas yang penting dalam membuat suatu inovasi baru. Hal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Aspek kesesuaian Pelaksanaan Program GaDIS berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017.
Inovasi Program GaDIS yang diimplementasikan di Desa Sidodadi telah sesuai dengan prinsip-prinsip Program GaDIS yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 yaitu inisiatif, partisipatif, demokratis, manfaat, gotong royong, dan berkelanjutan sehingga bisa dikatakan kalau inovasi Program GaDIS ini dapat diadopsi dengan mudah oleh masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung.
- 2) Aspek kesesuaian anggaran.
Pada aspek kesesuaian anggaran, dana bantuan dari Program GaDIS yang diberikan kepada desa memang telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran yaitu sebesar Rp 100 juta tanpa ada potongan sedikitpun dari dinas/lembaga yang berkaitan. Berdasarkan pelaksanaannya, inovasi Program GaDIS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Pesawaran yang dalam penelitian ini difokuskan pada Desa Sidodadi telah sesuai dengan aspek kompatibilitas atau kesesuaian.
- 3) Kerumitan (*complexity*)
Menurut Rogers yang dikutip dalam Noor (2017:92), beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi.

Inovasi Program GaDIS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan melibatkan para *stakeholder* terkait beserta seluruh masyarakat

desa di Kabupaten Pesawaran tidak terlepas dari berbagai kendala yang mengganggu pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kerumitan yang terjadi dalam pengimplementasian inovasi Program GaDIS di Desa Sidodadi yaitu dalam hal administrasi. Kerumitan yang dihadapi oleh pengadopsi inovasi yang dalam hal ini adalah masyarakat merupakan kerumitan yang sangat umum dan wajar dijumpai mengingat inovasi tersebut tergolong sangat kompleks dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Kerumitan-kerumitan yang dihadapi oleh pengadopsi inovasi akan membuat inovasi ini semakin lebih baik karena dengan munculnya berbagai kerumitan tersebut maka akan muncul kesadaran untuk terus memperbaiki.

4).Kemampuan diujicobakan (*trialiability*)

Suatu inovasi menurut Rogers dalam Noor (2017:92) yang dapat diuji cobakan dalam *setting* sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik” dalam batas waktu tertentu. Inovasi Program GaDIS memiliki rentang waktu untuk diuji coba selama kurang lebih 5 tahun sesuai dengan masa jabatan dari pemangku kepentingan yaitu Bupati Pesawaran. Apabila selama 5 tahun tersebut, inovasi program ini dapat berjalan dengan baik dan memiliki lebih banyak dampak positif bagi pengadopsi kebijakan, maka bisa jadi program ini akan dilanjutkan lagi apabila Bapak H. Dendi Romadhona, ST terpilih kembali untuk menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran periode selanjutnya karena inovasi Program GaDIS ini merupakan salah satu program kerja jangka panjang beliau yang menyesuaikan dengan visi dan misi yang telah dibuat.

5)Kemampuan diamati (*observability*)

Menurut Rogers yang dikutip dalam Noor (2017: 93), hasil suatu inovasi harus dapat terlihat oleh orang lain. Dalam mengoperasikan suatu program, menurut Charles O Jones dalam Suryana (2009:28), harus lah memiliki aspek interpretasi yang berarti para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai

dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan pendapat tersebut, inovasi suatu program tidak boleh lepas dari pengamatan sehingga pengimplementasian dan pelaksanaannya harus diawasi dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana demi tercapainya tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan.

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan Program GaDIS di Desa Sidodadi, aspek kemampuan diamati telah dipenuhi. Faktor pengawasan dalam pengimplementasian program GaDIS di desa ini memiliki peranan yang sangat penting. Pelaksanaan unit-unit kegiatan usaha tidak lepas dari berbagai masalah, seperti adanya permasalahan belum didapatkannya keuntungan secara signifikan dari setiap unit kegiatan usaha yang ada di desa, namun dengan melibatkan berbagai pihak maka masalah tersebut dapat diatasi secepat mungkin.

Permasalahan belum didapatkannya keuntungan secara signifikan disebabkan karena promosi usaha yang dilakukan kelompok usaha hanya sebatas pada pasar-pasar lokal saja, namun melalui Badan usaha milik Desa yang ada di desa tersebut, para pelaku usaha tersebut dibantu untuk memasarkan produknya sehingga permintaan akan barang tersebut pun bertambah dan akan berdampak pula pada peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Sinergitas para aktor dilihat melalui indikator dari teori sinergitas yang dikemukakan oleh Sofyandi & Garniwa (2014) yang meliputi:

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai sebuah proses penyampaian ide, konsep, gagasan maupun informasi dari individu kepada individu lain.

Komunikasi yang berorientasi pada sumber memandang bahwa

komunikasi sebagai kegiatan dengan seseorang (sumber) secara

sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan, dan komunikasi yang berorientasi pada penerima yang memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

Para aktor pentahelix melakukan komunikasi antar pihak yang turut terlibat dalam pelaksanaan program Gadis secara virtual maupun tatap muka yang dilakukan dengan pengawasan dari pemerintah Kabupaten Pesawaran. Komunikasi yang terjalin pada seluruh aktor yang terlibat telah sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Sofyandi & Garniwa (2014) dengan tercapainya komunikasi yang terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

2. Koordinasi

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Dalam hal ini Silalahi mendefinisikan koordinasi sebagai bentuk integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam sebuah usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Koordinasi juga diartikan sebagai proses pengaturan dengan memadukan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Koordinasi beberapa aktor pentahelix yang turut terlibat dalam pelaksanaan program Gadis cenderung berjalan masing-masing. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan bahwa beberapa aktor-aktor pentahelix masih menjalankan program nya masing-masing dengan tidak melakukan kerjasama antar aktor pentahelix lain.

Koordinasi yang dikemukakan oleh Sofyandi & Garniwa (2014) didefinisikan sebagai pengaturan dengan menyatukan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mayoritas aktor-aktor pentahelix telah melakukan koordinasi yang baik dengan melakukan kerjasama dalam mengimplementasikan programnya guna

mencapai tujuan yang diharapkan walaupun ada beberapa aktor yang belum melakukan koordinasi dengan baik.

Matriks Sinergitas Aktor dalam pelaksanaan Program GaDis

No	Indikator Sinergitas	Aktor Pentahelix
1.	Komunikasi	<p>1. Pemerintah Dalam pelaksanaan program Gadis , komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan hubungan antar aktor pentahelix yang terjalin dengan baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan</p>
		<p>2. Akademisi komunikasi yang dilakukan oleh akademisi telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan hubungan akademisi dengan aktor-aktor lain yang turut terlibat dalam pelaksanaan program Gadis dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.</p>
		<p>3. Komunitas komunikasi yang dilakukan komunitas telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan hubungan antara komunitas dengan aktor pentahelix telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pelaksanaan program Gadis ini</p>
		<p>4. Dunia usaha/Swasta Dalam pelaksanaan program Gadis, dunia usaha/swasta telah melakukan komunikasi dengan baik antar aktor pentahelix.Komunikasi yang dilakukan secara virtual dan tatap muka.</p>
		<p>5. Media Dalam pelaksanaan program Gadis, media telah melakukan komunikasi dengan baik antar aktor-aktor pentahelix ditandai dengan keterlibatan media dalam diskusi antar pihak terkait baik secara virtual maupun secara tatap muka</p>
2.	Koordinasi	<p>1. Pemerintah Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Gadis telah melakukan kerjasama dengan baik dalam mengimplementasikan program-program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.</p>

		2. Akademisi Dalam pelaksanaan program Gadis, koordinasi belum berjalan secara optimal, baru sebatas koordinasi dengan masyarakat.
		3. Komunitas Komunitas telah menjalankan koordinasi dengan optimal antar aktor-aktor pentahelix. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi program-program yang dijalankan telah melibatkan akademisi, media dan masyarakat
		4. Dunia usaha/Swasta dunia usaha/swasta telah melakukan kerjasama dengan baik antar aktor-aktor pentahelix dalam menjalankan program guna mencapai tujuan yang diharapkan.
		5. Media Media melakukan kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam pelaksanaan program Gadis

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

5.2 Sinergitas *Stakeholder* Dalam Pelaksanaan Program GaDIS Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa aktor yang terlibat dalam sinergitas *stakeholder* dalam pelaksanaan program Gerakan Desa Iktu Sejahtera (Gadis) terdiri dari lima elemen, yaitu pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media. Aktor yang terlibat dari elemen pertama, yaitu pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran tepatnya Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran masing-masing aktor adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Peran
Pemerintah

No	Aktor	Peran	Sinergi
1.	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	Pemberian anggaran dan fasilitas sarana prasarana. Memotivasi serta mendukung kegiatan Program Gadis	Berjalan dengan baik.

2	Dinas PMD Kabupaten Pesawaran	Melakukan himbauan, sosialisasi, pemberian fasilitas saranadan prasarana. Memotivasi serta mendukung kegiatan program Gadis	Berjalan dengan baik
3.	Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan	Melakukan himbauan, sosialisasi, pemberian fasilitas saranadan prasarana. Memotivasi serta mendukung kegiatan program Gadis	Berjalan dengan baik
4	Pemerintah Desa Sidodadi	Melakukan himbauan, sosialisasi, pemberian fasilitas saranadan prasarana. Memotivasi serta mendukung kegiatan program Gadis	Berjalan dengan baik
5	Bumdes Desa Sidodadi	Mensosialisasikan rancangan pengajuan kegiatan usaha atas inisiatif masyarakat desa sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki desa.	Berjalan dengan baik

Elemen kedua yaitu masyarakat (*civil society*), dukungan masyarakat terhadap Program GaDIS ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk mengajukan proposal kegiatan usaha mereka agar mereka bisa mendapatkan bantuan dana dari Program GaDIS ini. Hasil nyata dukungan juga terlihat dalam proses pengimplementasian Program GaDIS ini, masyarakat benar-benar memanfaatkan bantuan dana ini untuk menjalankan usaha mereka. Dukungan masyarakat pada inovasi ini dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung seperti yang diungkapkan oleh Vries, dkk dalam Rumoharbo (2016:23), bahwa partisipasi dalam jaringan dapat menjadi faktor pendukung inovasi.

Elemen ke tiga, pelaku usaha yang bekerjasama dengan BumDes Desa Sidodadi antara lain PT.Aneka Usaha Laba Jaya Utama dan PT.Inerect produsen garam di desa Sidodadi, sinergitas berjalan dengan baik. Baik dalam hal kerjasama perdagangan, pengemasan, produksi garam premium, produksi garam KW 1, 2 dan 3 serta produksi garam untuk kebutuhan industri dan produksi garam tua. PT.Inerect saat ini membudidayakan garam di areal seluas 5.000M persegi dengan pengeringan matahari *close* plastik UV serta bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Elemen ke empat adalah Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Lampung yang telah menjalin kerjasama dengan desa-desa di Kabupaten Pesawaran antara

lain melalui program desa binaan, program pengabdian masyarakat, tidak terkecuali di desa Sidodadi

Elemen selanjutnya (ke lima) adalah media, keberadaan media ikut berpengaruh dalam penyebaran informasi melalui media lokal dan beberapa media on line lainnya; juga terjalin antara lain up date informasi melalui web site resmi, publikasi melalui media cetak.

Koordinasi antara Pemerintah Daerah, stakeholder dan masyarakat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah menurut Nurcholis (2007 : 268-269) menyusun strategi pelaksanaan kebijakan, kemudian sekretariat daerah menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pokok kebijakan, dan menyediakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Sekretariat daerah melakukan koordinasi dengan dinas dan lembaga teknis. Dinas sebagai pelaksana kebijakan membuat perumusan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan perizinan dan pelayanan umum dan melakukan monitoring terhadap tugas yang menjadi lingkup tugasnya. Dinas yang melaksanakan kebijakan Program GaDIS di Kabupaten Pesawaran ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Pesawaran. Dalam mengimplementasikan Program GaDIS, Dinas PMD Pesawaran dibantu dengan camat sebagai pihak yang memverifikasi proposal pengajuan usaha yang berasal dari desa, kemudian dibantu oleh Pemerintah Desa, pendamping desa serta masyarakat dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Menurut Nurcholis (2007:272) keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan ditentukan oleh adanya dukungan dari lembaga eksternal seperti misalnya LSM, masyarakat, kelompok profesi, dan lembaga lain di luar lembaga pelaksana tentunya akan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adanya program GaDIS ini menyebabkan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta *stakeholder* terkait yang dalam hal ini adalah Camat, Pemerintah Desa, Pendamping Desa serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di seluruh desa di Kabupaten Pesawaran berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga dapat terjalin lingkungan yang

harmonis antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan pemerintah desa beserta *stakeholder* terkait.

Menurut Rogers dalam Rumoharbo (2016:24), salah satu faktor pendukung inovasi yaitu dapat terciptanya lingkungan yang harmonis antara pembuat kebijakan beserta para *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan suatu inovasi. Terjalannya hubungan yang harmonis/sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran beserta seluruh *stakeholder* terkait maka dapat membuat pengimplementasian program GaDIS di desa-desa bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan desa yang tangguh dan mandiri dengan cara meningkatkan perekonomian desa sehingga angka kemiskinan yang ada di desa dapat menurun dan masyarakat dapat hidup sejahtera.

- 1) Inovasi didukung oleh adanya kebebasan berekspresi menjadi jalan berinovasi

Kebebasan berekspresi merupakan suatu kondisi dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk berbicara, bertindak atau menuangkan buah pikirannya kepada khalayak ramai. Berdasarkan kutipan wawancara dari beberapa informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran memenuhi faktor pendukung adanya inovasi yang diungkapkan oleh Rogers dalam Rumoharbo (2016:24) yaitu adanya kebebasan untuk berekspresi.

Adanya peraturan dari Pemerintah Pusat yang memberikan kebebasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan di daerahnya khususnya yang berkenaan dengan peningkatan pelayanan publik, menjadi salah satu faktor pemicu Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk berekspresi menciptakan suatu inovasi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan dan potensi-potensi yang ada di daerahnya salah satunya melalui pembuatan inovasi Program GaDIS.

- 2) Dukungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap Program GaDIS

Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan sebuah inovasi kebijakan apalagi jika memang sebuah

inovasi kebijakan tersebut memang ditujukan untuk masyarakat seperti halnya inovasi Program GaDIS ini. Dukungan masyarakat disamping menopang percepatan pelaksanaan inovasi kebijakan, pada sisi lain juga akan berdampak pada proses evaluasi/kontrol atas kinerja pemerintah dan mampu untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan penelitian, dukungan masyarakat terhadap Program GaDIS ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk mengajukan proposal kegiatan usaha mereka agar mereka bisa mendapatkan bantuan dana dari Program GaDIS ini. Hasil nyata dukungan juga terlihat dalam proses pengimplementasian Program GaDIS ini, masyarakat benar-benar memanfaatkan bantuan dana ini untuk menjalankan usaha mereka. Dukungan masyarakat pada inovasi ini dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung seperti yang diungkapkan oleh Vries, dkk dalam Rumoharbo (2016:23), bahwa partisipasi dalam jaringan dapat menjadi faktor pendukung inovasi.

3) Alokasi Anggaran

Anggaran menjadi unsur penting terlaksananya inovasi, karena jika tidak terdapat anggaran dari APBD Kabupaten Pesawaran maka inovasi ini tidak dapat dilakukan sebab Program GaDIS ini merupakan program pemberian bantuan dana yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagai modal untuk membuka usaha-usaha di desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa. Adanya anggaran juga menjadi bukti bahwa faktor anggaran tidak menjadi penghambat melainkan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan Program GaDIS di Kabupaten Pesawaran. Hal ini juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat yang dikemukakan oleh Albury dalam Rumoharbo (2016:21) dan Sumanjoyo dan Hermawan (2018:40) tidak terjadi pada inovasi Program GaDIS ini.

Selain faktor-faktor pendukung adapun faktor-faktor penghambat terkait sinergitas *stakeholder* dalam implementasi Program Gadis, antara lain :

Administrasi & SOP unit usaha belum ada, *Standard Operating Procedure* atau SOP sebenarnya sangat dibutuhkan dalam bisnis UKM untuk sebuah pembiasaan. Layaknya perusahaan waralaba, bisnis UKM pun harus mampu menciptakan standarisasi kerja. Tujuannya untuk menjaga kualitas produk tetap baik dan membiasakan anggota memiliki sebuah panduan sistem kerja yang terarah sehingga lebih mudah bagi pihak pengelola untuk melakukan kontrol. SOP adalah salah satu alat manajemen usaha untuk meningkatkan kinerja anggota menjadi lebih baik.

Berdasarkan kutipan wawancara dari beberapa informan menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam melaksanakan Program GaDIS adalah belum adanya kelengkapan administrasi sebab tidak ada instrumen laporan perkembangan usaha yang dibuat oleh para pelaku usaha di desa tersebut. Adanya tuntutan dari pihak penyelenggara kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dalam hal ini di bawahi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran terhadap laporan administrasi membuat aparatur Pemerintah Desa dan Bumdes merasa kesulitan karena apabila masyarakat tidak dapat membuat laporan perkembangan usaha mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka hal ini akan dikerjakan oleh aparatur Pemerintah Desa beserta BumDes. Selain itu per unit kegiatan usaha yang ada di Desa Sidodadi juga belum memiliki SOP dalam pelaksanaan usahanya sehingga hal ini dapat berakibat pada munculnya hambatan-hambatan dalam usaha.

Menurut Albury yang dikutip oleh Rumoharbo (2016:21) menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan suatu inovasi ialah adanya hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel. Sama halnya juga dengan pendapat menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikutip oleh Sumanjoyo dan Hermawan (2018:40), dalam melakukan inovasi, salah satu hambatan yang dihadapi adalah adanya tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik vs beban tugas administratif. Hal ini membuktikan bahawa pelaksanaan Program GaDIS memiliki tuntutan yang besar yang berasal dari penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal administrasi sehingga membuat inovasi ini menjadi tidak fleksibel.

- 1) Manajemen usaha yang buruk

Manajemen bagi usaha kecil menengah (UKM) setidaknya harus terdiri dari :

- a. Bagian produksi
- b. Bagian pemasaran
- c. Bagian sumber daya manusia (SDM)
- d. Bagian Keuangan

Keempat bagian diatas mutlak harus dimiliki oleh pelaku usaha kecil menengah (UKM). Keempat bagian itupun saling berkaitan untuk menjalankan suatu usaha. Sulitnya memanejemen keempat bidang tersebut bisa berdampak pada vakumnya suatu usaha atau bahkan dapat membuat usaha tersebut menjadi gulung tikar. Seperti halnya yang dialami oleh beberapa unit usaha yang ada di Desa Sidodadi.

Sumanjoyo dan Hermawan (2018:40) mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat inovasi yaitu lemahnya dalam kecakapan (*skills*) untuk mengelola resiko atau mengelola perubahan. Hal ini terlihat dari banyaknya unit kegiatan usaha yang vakum yang terjadi di Desa Sidodadi yang mendapatkan bantuan dana dari Program GaDIS. Mayoritas kendala yang dialami oleh pengelola usaha dalam hal pemasaran. Masyarakat hanya melakukan pemasaran di sekitaran pasar-pasar lokal saja mengingat aksesibilitas kemampuan masyarakat yang belum sepenuhnya bisa menggunakan sosial media untuk melakukan pemasaran produk usaha mereka, karena di era digital saat ini sangat penting untuk bisa mengetahui dan menggunakan sosial media dalam mengelola bisnis usaha.

Selain itu lemahnya kemampuan (*skill*) masyarakat dalam mengatur keuangan di unit usaha mereka juga menjadikan hal ini sebagai faktor penghambat pelaksanaan inovasi sehingga banyak usaha yang vakum di Desa Sidodadi yang juga berakibat pada belum bisanya desa ini untuk meningkatkan kapasitas usaha.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Sinergitas stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan program GaDis di Kabupaten Pesawaran di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi

a. Pemerintah

Dalam pelaksanaan program Gadis , komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan hubungan antar aktor pentahelix yang terjalin dengan baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan

b. Akademisi

Komunikasi yang dilakukan oleh akademisi telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan hubungan akademisi dengan aktor-aktor lain yang turut terlibat dalam pelaksanaan program Gadis dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Komunitas

Komunikasi yang dilakukan komunitas telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan hubungan antara komunitas dengan aktor pentahelix telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pelaksanaan program Gadis ini

d. Dunia usaha/Swasta

Dalam pelaksanaan program Gadis, dunia usaha/swasta telah melakukan komunikasi

dengan baik antar aktor pentahelix. Komunikasi yang dilakukan secara virtual dan tatap muka

e. Media

Media melakukan kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mensosialisasikan program Gadis kepada masyarakat luas.

2. Koordinasi :

a. Pemerintah

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Gadis telah melakukan kerjasama dengan baik dalam mengimplementasikan program-program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan

b. Akademisi

Dalam pelaksanaan program Gadis, koordinasi belum berjalan secara optimal, baru sebatas koordinasi dengan masyarakat.

c. Komunitas

Komunitas telah menjalankan koordinasi dengan optimal antar aktor-aktor pentahelix. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi program-program yang dijalankan telah melibatkan akademisi, media dan masyarakat

d. Dunia usaha/Swasta

dunia usaha/swasta telah melakukan kerjasama dengan baik antar aktor-aktor pentahelix dalam menjalankan program guna mencapai tujuan yang diharapkan.

e. Media

Media melakukan kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mensosialisasikan program Gadis kepada masyarakat luas

6.2 Saran

- a. Perlunya dibuat regulasi tentang kerjasama antar aktor pentahelix dalam pelaksanaan program Gadis dengan demikian kesejahteraan masyarakat semakin meningkat
- b. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih memaksimalkan program peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program Gadis

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Erliana. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noor, Dr. Iwan. 2017. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang : UB Press

Peraturan Perundang-Undangan

_____. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Mahardika

_____. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Bandung : Fokus Media

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran.

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran.

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2016-2021

***Curriculum vitae* Ketua Peneliti**

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (gelar)	Dra. Dian Kagungan, M.H	(p)
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala	
3	Jabatan Struktural	-	
4	NIP	19690851997032001	
5	NIDN	0015086903	
6	Tempat Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 15 Agustus 1969	
7	Alamat Rumah	Jl. Badak No. 16 Kedaton Bandar Lampung, 35147	
8	No.Telp/Hp	0721-786522/081540918098	
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro 1 Gedung Meneng Bandar Lampung	
10	No. Telp/Fax	(0721) 701609,701888/701888	
11	Alamat e-mail	diankagungan@gmail.com	
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 100 orang S2= orang S3= orang	
13	Mata Kuliah yang diampu	1.Administrasi Pemerintahan Daerah	

		2.Sistem Administrasi Negara Indonesia
		3.Hukum Administrasi Negara
		4.Pengantar Ilmu Hukum
		5.Manajemen Pembangunan

B.Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan			
Program	S1	S2	S3
Nama PT	Univ. Lampung	Univ.Lampung	Univ Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Hukum dan Kebijakan Publik	Studi Pembangunan
Thn Masuk	1988	2002	2020
Thn Lulus	1992	2005	Sedang ditempuh
Judul Skripsi Tesis Disertasi	Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif	Struktur dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004	
Nama Pembimbing Skripsi dan Tesis	Drs. A. Kantan Abdullah Drs. Yana Ekana, PS	Prof. Dr.Sanusi Husin, S.H.M.H Adius Semenguk, S.H. M.S	

C.Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
			Sumber
1	2005	Penerapan Model <i>Collaborative Teamwork Learning</i> Pada Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa (<i>Teaching Grant</i>)	Pemerintah Provinsi Lampung
2	2009	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Integrated Coastal Zone Management</i> di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir	Penelitian Hibah Strategis Nasional Batch II Unila, DP2M, DIKTI Jakarta (Ketua Peneliti)

		Bandar Lampung Sebagai <i>Pilot Project</i> Penataan Wilayah Pesisir Indonesia Barat) tahap 1 (selesai)	
3	2009	Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan register 30 Gunung Tanggamus menggunakan media panduan Hkm	Penelitian hibah bersaing Dikti Jkt tahap 1
4	2010	Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan register 30 Gunung Tanggamus menggunakan media panduan Hkm	Penelitian hibah bersaing Dikti Jkt tahap II
5	2011	Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan register 30 Gunung Tanggamus menggunakan media panduan Hkm	Penelitian hibah bersaing Dikti Jkt tahap III
6	2010	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru Melalui Pemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan <i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance (tahap 1)</i>	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M, DIKTI Jakarta (Ketua Peneliti)
7	2011	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru Melalui Pemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan <i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance (tahap 2 selesai)</i>	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M.DIKTI Jakarta (Ketua Peneliti)
8	2011	Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Government</i> dan <i>Clean</i>	Penelitian Hibah Bersaing DP2M.DIKTI Jakarta (Anggota Peneliti)

		<i>Governance</i>) Di Daerah Otonom Baru (Studi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung) Tahap I Selesai	
9	2013	MODEL TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (<i>GOOD GOVERNANCE</i>) DI DAERAH OTONOM BARU: PARTISIPASI PUBLIK DALAM REKRUTMENT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (<i>tahap I selesai</i>)	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M.DIKTI Jakarta (Anggota Peneliti)
10	2013	Inovasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Bidang Pendidikan (<i>Stakeholder Analysis Program Bina Lingkungan</i>)	Dipa Fakultas ISIP Unila (Ketua)
11	2014	MODEL <i>INNOVATIVE GOVERNMENT</i> DAERAH OTONOM BARU: FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	Penelitian Desentralisasi (hbh Bersaing) Dikti, Ketua Peneliti (<i>tahap 1</i>)
12	2015	MODEL <i>INNOVATIVE GOVERNMENT</i> DAERAH OTONOM BARU: FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	Penelitian Desentralisasi (hbh Bersaing) Dikti, Ketua Peneliti (<i>tahap 2</i>)
13	2015	Model Reformasi Birokrasi Era Otonomi Daerah : Penetapan Zona Integritas Anti Korupsi	Penelitian Strategis Nasional DIKTI Jkt tahap 1

		Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance dan Clean Government	
14	2016	Model Reformasi Birokrasi Era Otonomi Daerah : Penetapan Zona Integritas Anti Korupsi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance dan Clean Government	Penelitian Strategis Nasional DIKTI Jkt tahap 11
15	2016	MODEL KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI BIDANG KEPEGAWAIAN NEGARA : EVALUASI KEBIJAKAN SELEKSI SUMBER DAYA APARATUR BERBASIS <i>COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)</i> DALAM RANGKA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	Ketua Peneliti Penelitian Produk Terapan (Hibah Bersaing) Tahap 1/Desentralisasi/Dikti Selesai
16	2017	Model Formulasi Kebijakan Penatakelolaan Wisata Desa Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (Menjadikan Kabupaten Pesawaran Sebagai Kawasan Strategis Pusat Pariwisata Di Propinsi Lampung)	Ketua Peneliti Penelitian Produk Terapan Tahap 1 Kemenristekdikti Jakarta
17	2018	Model Formulasi Kebijakan Penatakelolaan Wisata Desa Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (Menjadikan Kabupaten Pesawaran Sebagai Kawasan Strategis Pusat Pariwisata Di Propinsi Lampung)	Ketua Peneliti Penelitian Strategis Nasional Institusi Lanjutan Tahap 2 Kemenristekdikti, Jakarta
18	2019	Model Formulasi Kebijakan Penatakelolaan Wisata Desa Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (Menjadikan Kabupaten Pesawaran Sebagai Kawasan Strategis Pusat Pariwisata Di Propinsi Lampung)	Ketua Peneliti Penelitian Strategis Nasional Institusi Lanjutan Tahap 3 Kemenristekdikti, Jakarta
19	2019	MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN	Anggota peneliti Penelitian Terapan Unggulan PT

		INDUSTRI PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROPINSI LAMPUNG	Kemenristekdikti Jkt Batch 1
20	2020	MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROPINSI LAMPUNG	Penelitian Terapan Unggulan PT Kemenristekdikti Jkt Batch 1
21	2021	MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BAHARI MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI PROPINSI LAMPUNG	Penelitian Terapan Unggulan PT Kemenristekdikti Jkt Batch 3

D.Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan
			Sumber
1	2007	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam perumusan Kebijakan Desa Melalui Adaptasi Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat (PPDBM)	Dipa Unila
2	2008	Pelatihan Pengelolaan Dana Pembangunan Desa yang Berwawasan <i>Good Governance</i> bagi Aparatur Desa	Dipa Unila
3	2009	Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pekon Di Pekon Kuto Dalam Kabupaten Tanggamus	Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila
4	2010	Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Upaya Mewujudkan Good Government dan Clean Governance) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar	Dipa Unila
5	2010	Pelatihan Tentang Peningkatan Peran Aparat Pemerintah Desa Pada Era Otonomi Daerah (Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Good Governance)	Jurusan Administrasi Negara

8	2011	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bagi Aparatur Desa Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Jurusan Administrasi Negara
9	2012	Pelatihan Kepemimpinan Pada Organisasi Siswa Intra Sekolah Madrasah Aliyah se Kabupaten Lampung Timur	Jurusan Adm Negara FISIP UNILA
9	2013	PENINGKATAN KAPASITAS BADANPERMUSYAWARATAN DESA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERPERSPEKTIF <i>GENDER</i> (UPAYA PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PEDESAAN) DI KECAMATAN JATI AGUNG	Jurusan Administrasi Negara
10	2014	Pelatihan Pelayanan publik bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan	Jurusan Adm Negara
11	2015	Peningkatan Kemampuan Technical Skill Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Natar	Jurusan Adm Negara
12	2016	Optimalisasi Kualitas Layanan Publik Bagi Layanan Administrasi Pemerintahan di Di Desa Hurun Kab Lam Sel	Jurusan Administrasi Negara, Anggota
13	2016	Peningkatan Kapasitas Penerima Program Bantuan Wirausaha di Lembaga CCC (children crisis center) Lampung Melalui Penggunaan Analisis SWOT untuk Menciptakan Usaha Strategis	Dipa Unila, Anggota
14	2017	Peningkatan Kapasitas Perempuan melalui Kelembagaan Kelompok Sadar wisata (pokdarwis) di Kecamatan Padang cermin	Jurusan Administrasi Negara
15	2018	<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DAN PENGUATAN PERAN EKONOMI PEREMPUAN PESISIR DALAM PENGEMBANGAN</i>	Dipa BLU SENIOR UNILA

		<i>WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL</i>	
16	2019	<i>PEMAMPUDAYAAN KELEMBANGAN DESA DAN POKDARWIS MELALUI DIKLAT PEMANFAATAN TI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS SDA</i>	Dipa BLU Senior Unila Anggota
17	2020	<i>Pelatihan Tatakelola Destinasi Pariwisata Berbasis Medis Branding Strategy</i>	Dipa BLU Unggulan Ketua
18	2021	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PASCA TSUNAMI BAGI KELOMPOK SADAR WISATA DESA MINANG RUA BAHARI SEBAGAI KEARIFAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN BANGKIT MENUJU KEMANDIRIAN	Dipa BLU Unggulan Unila Ketua
19	2021	Diklat Pengembangan Pariwisata Kampoeng Kopi Desa Rigin Jaya Kecamatan Air Hitam Kab Lampung Barat	Dipa unggulan Unila BLU Anggota

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No
1	2008	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Model <i>Collaborative TeamWork Learning</i> Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 5 bulan Juli-Desember 2008	2/5
2	2009	Evaluasi Implementasi Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG Kecamatan Bekasi Timur	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 3 No. 6 bulan Januari-Juni 2009	3/5

3	2010	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Integrated Coastal Zone Management</i> di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai <i>Pilot Project</i> Penataan Pesisir Indonesia Barat)	nal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 3 bulan Juli-Desember 2010	2/3
4	2011	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin	ministratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 32bulan Juli-Desember 2011 SN 2087-0825	2/2
5	2012	Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Di Kota Bandar Lampung	psiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dies Natalis Fisip Unila, ISBN 978-602-7509-47-4 hal 174-196 Desember 2012	
6	2012	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	blica, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2 No. 1 Maret 2012 n.22-33 ISSN 2087-796X Penerbit Fisip Univ Bandar Lampung	2/1
7	2013	Reformasi Pelayanan Publik Di Daerah otonom Baru	ministratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan ISSN 2087-0825 1 4 no 1 Januari –Juni 2013	4/1
8	2016	<i>POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON COMPUTER ASSISTED TEST IN LAMPUNG (THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014</i>	occeeding Konferensi Internasional 1 st SHIELD UNILA	2-3 November 2018

10	2017	The Effect of Decentralization on Helath Services: The Experient of Pesawaran District, Lampung Province, Indonesia	<i>e Social Science Journal: 12 (11) 2164-2168, 2017</i> PN 1818- 5800 <i>dwel Journal</i>	
11	2017	<i>THE CAPACITY DEVELOPMENT POLICY FOR APARATUR THROUGH NEW GOVERNMENT PARTNERSHIP CORPORATION IN LAMPUNG TO OPTAIN OPTIMUM PUBLIC SERVICE</i>	<i>proceeding Konferensi Internasional 2 st SHIELD 18-20 SEPTEMBER 2017UNILA</i>	
12	2018	<i>E- TOURISM GOVERNANCE POLICY FOR COASTAL VILLAGE INI PESAWARAN REGENCY</i>	<i>proceeding IICIS Lampung University. 2018</i>	
14	2018	Communities Empowerment and Collaboration Between Stakeholders on Utylization of Community Forest as a Solution for Poverty Reduction and Reduce Intensity of Chopping of Protected Forest in Lampung Province	<i>Journal of Law, Policy and Globalization</i> 178/2018	
15	2018	Strategi For Building Community – Reliance in Managing and Utylizing Community Forest Through The Policy of Community Forest Development	<i>OS 7 (79) Juli 2018</i>	
16	2018	KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE STUDI PADA MASYARAKAT PULAU PAHAWANG	<i>ublish pada Monograph : Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan</i> <i>ra publishing, 2018</i>	
17	2019	The Synergi among stakeholder to develop Pisang Island as marine tourism: The case of underdevelop area	<i>Journal MKP UNAIR vol 2/2019</i>	
18	2019	<i>Inter Regional Cooperation Policy Through Determination Of Anti Corruption Integrity Zone For Achieving Good Governance Principles. Journal of Law, Policy and Globalization. ISSN ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online)</i>	<i>Journal of Law, Policy and Globalization</i> PN ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online)2019	

19	2020	<i>GOVERNMENT APPROACH ON MARINE TOURISM INDUSTRY POLICY (International Journal of Bussiness Research on Social Science) vol 9 (7) 2020</i>		
20	2021	PROSPEKTIF STUDY TOURISM INDUSTRY STRATEGY IN NEW NORMAL ERA	International Journal of Entrepreneurship (Print ISSN: 1099-9264; Online ISSN: 1939-4675) <i>Scopus Q2</i> Research Article: 2021 Vol: 25 Issue: 2	
21	2021	GENPY'S STRATEGI IN THE DEVELOPMENT DIGITAL TOURSIM DESTINATION IN LAMPUNG PROVINCE	Sosiohumaniora Journal of Social Scientist Humanities vol 23 nomor 2, Juli 2021	

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terakhir

No	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Waktu	Tempat
1	ICSPI-UI (International Conference Social and Politic Issues)	<i>THE INNOVATIVE GOVERNMENT FOR NEW AUTONOM REGION: STRATEGY FORMULATION FOR THE DEVELOPMENT ACCELERATION OF NEW AUTONOM REGION BASED ON INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING AND EMPOWERMENT OF LOCAL COMMUNITY FOR CREATING GOOD GOVERNANCE</i>	18-19 Oktober 2016	Bali
2	HIPIIS –Unsri Palembang	<i>POVERTY SOLVING POLICY THROUGH OPTIMIZING POLICY ABOUT THE DEVELOPMENT AREA OF WISATA BAHARI BASED ON LOCAL WISDOM AND CAPACITY BUILDING INSTITUTION IN ORDER TO MAINTAIN COMMUNITY WELFARE</i>	27-28 Oktober 2016	Unsri, Palembang
3	SHIELD-UNILA	<i>POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON</i>	9 November 2016	Unila

		<i>COMPUTER ASSISTED TEST IN LAMPUNG (THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014</i>		
4	ICVHE- UI	<i>COMMUNITY DEVELOPMENT MODEL WITH COMMUNITY BEST FOREST WITH MANAGEMENT THROUGH THE SETTING OF MANAGEMENT FOREST RIGHT IN TANGGAMUS, LAMPUNG PROVINCE</i>	9 November 2016	UI, Depok
5.	2rd SHIELD CONFERENCE LAMPUNG UNIVERSITY	<i>THE CAPACITY DEVELOPMENT POLICY FOR APARATUR THROUGH NEW GOVERNMENT PARTNERSHIP CORPORATION IN LAMPUNG TO OBTAIN OPTIMUM PUBLIC SERVICE</i>	18-20 SEPTEMBER 2017	BANDAR LAMPUNG
6	IICIS lampung university	<i>E- TOURISM GOVERNANCE POLICY FOR COASTAL VILLAGE INI PESAWARAN REGENCY</i>	10 SEPTEMBER 2018	Bandar Lampung
7.	Ico CSPA UNAIR SURABAYA	<i>Free Internet Program for Public Literacy Development in North Lampung</i>	12 AGUSTUS 2018	UNAIR SURABAYA
8	Sefila Fisip Unila	<i>Kebijakan Hutan Kemasyarakatan</i>	Oktober 2019	Bandar Lampung
9	<i>Presenter Master and Doctoral Koloquium Join International Summer School 2021 Building Resilience and Time of Covid 19 Pandemic 15-17 Juni 29021</i>	<i>Development Policy Innovation of New Autonomous Region: Implementation of Smart Rural Model for Village Tourism Initiatives in Indonesia</i>	15-17 Juni 2021	Universitas Lampung,

G.Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
----	------------	-------	----------------	----------

1.	Manajemen Sumber Daya Aparatur (buku ajar)	2017	150	Aura Publishing ISBN
2.	Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Daeran Otonom Baru (BUKU REFERENSI)	2017	150	Aura Publishing ISBN
3	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (BUKU REFERENSI)	2017	150	Aura Publishing ISBN
4	Administrasi Pertanahan (buku ajar)	2019	247	Aura Publishing
5	Sistem Politik Indonesia (buku ajar)	2019	200	Aura Publish
6	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TELUK KILUAN (PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI TELUK KILUAN)	2019	250	Graha Ilmu Yogyakarta
7.	Manajemen Pembangunan : Suatu Kajian Manajemen Pembangunan Bidang Kepariwisata	2021	200	Graha Ilmu Yogyakarta

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Kabijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru	2018, 5 Desember	Buku Referensi	000126918
2	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Prop Lampung	2019	Buku Ajar	000126919
3	Kebijakan Penatakelolan Pariwisata “one village one destination” di Kabupaten Pesawaran	2019	Buku Ajar	000161413
4	Hutan kemasyarakatan: Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera	2019	Buku Ajar	000161414
5	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TELUK KILUAN	2019	Buku referensi	Sertifikat Haki

	(PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI TELUK KILUAN)			
6	Legal Draft Model	2019	Naskah Akademik	Sertifikat Haki
7	Buku Ajar Manaj Pembangunan	2021	Buku ajar	On proses
8	Legal draft model	2021	Naskah akademik	Sertifikat Haki

1. Penghargaan yang diraih 10 tahun terakhir

No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi	Tahun
1.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandarlampung, 3 Agustus 2021

Hormat saya,

Dra. Dian Kagungan, M.H
NIP. 196908151997032001

Dokumentasi kegiatan penelitian



Kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Pesawaran